



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE PROVINSI BALI**

**TANGGAL 16 - 18 NOVEMBER 2020  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari 5 kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp400 triliun atau 30% dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan LPG turun Rp4,7 triliun menjadi Rp70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp54,8 triliun, turun Rp7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp62,2 triliun.

Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. Rerata, pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan.

Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Pada titik ini, subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market *imperfectionist*. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan

subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin, yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

Konsumen/pengguna dalam hal ini masyarakat di Provinsi Jawa Bali yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang menurut undang-undang berhak dan layak menerima serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dan pandangan dari konsumen/pengguna transportasi di Provinsi Bali terkait permasalahan alokasi pendistribusian subsidi energi. Konsumen/pengguna sebagai pihak penerima yang merasakan langsung dampak dari adanya subsidi energi ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan terkait penerimaan subsidi energi, sehingga apa yang menjadi tujuan penelaahan ini dapat kita capai bersama.

## **B. Ruang Lingkup**

Kunjungan Kerja BAKN ke Provinsi Bali ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait subsidi energi dari para *stakeholder* subsidi energi di Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Dampak penerapan subsidi energi, baik itu energi BBM, maupun gas yang dirasakan konsumen.
2. Pendapat konsumen terkait dengan kebijakan-kebijakan subsidi energi.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan subsidi energi yang dialami konsumen.
4. Kualitas dan kuantitas agen penyalur subsidi energi menurut konsumen.
5. Masukan dari konsumen agar distribusi subsidi energi bisa merata dan tepat sasaran.
6. Pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali
7. Permasalahan terkait penyaluran subsidi energi yang terjadi di wilayah Provinsi Bali.
8. Ketersediaan dan kepatuhan agen penyalur di wilayah Provinsi Bali.
9. Masukan guna perbaikan penyaluran subsidi energi, khususnya untuk penyaluran di wilayah Provinsi Bali.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. Identifikasi Masalah**

Hasil pemeriksaan BPK RI atas subsidi energi yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemberian subsidi energi. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018

menunjukkan bahwa terdapat 26 temuan dan 29 permasalahan, dengan nilai temuan kekurangan penerimaan negara yang mencapai Rp295,57 miliar.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap penyaluran/pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg pada tiga tahun terakhir, BPK RI selalu menemukan permasalahan penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak sesuai ketentuan. Besarnya kuota yang dialokasikan di wilayah Provinsi Bali menjadikan Provinsi Bali sebagai sample yang penting dalam penelaahan subsidi energi yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, khususnya untuk mendapatkan masukan apakah penyaluran subsidi energi di Provinsi Bali sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut.

## **B. Pertemuan dengan Pemerintah Kota Bali**

Pertemuan dengan Pemerintahan Provinsi Bali dihadiri oleh:

- 1) Kepala Dinas UMKM
- 2) Kepala Dinas Pertanian
- 3) Sekretaris Daerah Dinas Kelautan
- 4) Kepala Dinas Perhubungan

Dalam kegiatan kunjungan ke Kota Bali ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholder* subsidi energi sebagai berikut.

### **1. Kepala Dinas UMKM**

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas UMKM menyampaikan bahwa subsidi energi sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat Provinsi Bali. Provinsi Bali dalam kesehariannya mengandalkan sektor jasa, yang mengandalkan transportasi. Penduduk di Kota Bali sebanyak 4,22 juta jiwa, dengan sektor pariwisata sebagai mata pencaharian utama masyarakat. UMKM sangat merasa manfaat dari subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya subsidi listrik dan BBM. Pada saat pandemi Covid-19, pelaku usaha sangat terbantu dengan pembayaran listrik yang lebih rendah karena adanya subsidi. Dinas UMKM juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1 SPBE dan beberapa SPBU yang menyediakan BBM Premium di setiap wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali.

### **2. Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Daerah Dinas Kelautan**

Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Daerah Dinas Kelautan menyampaikan bahwa selama ini pemberian subsidi energi khususnya BBM dan gas sangat dirasakan manfaatnya. Hal ini memberikan dampak yang signifikan untuk penghematan biaya usaha sehingga menambah keuntungan yang didapatkan. Selama ini

subsidi BBM dan gas sudah tepat sasaran kepada yang berhak menerima.

### **3. Kepala Dinas Perhubungan**

Terkait dengan jenis transportasi yang mendapatkan BBM bersubsidi di Pemerintahan Provinsi Bali terdapat 3 jenis angkutan umum yang mendapatkan subsidi BBM, yaitu

- a) Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang dan barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih;
- b) Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam;
- c) Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah;

Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa dampak subsidi BBM terhadap pengguna transportasi sangat baik karena berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor perekonomian khususnya pada sektor pariwisata. Adanya subsidi BBM ini membuat biaya transportasi menjadi rendah. Selain itu juga membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.

Subsidi BBM memberikan dampak pada angkutan umum dalam penetapan di tarif, karena BBM merupakan faktor utama dalam perhitungan biaya operasi kendaraan. Maka ketika harga subsidi BBM ini rendah maka tarif pun akan rendah sehingga dapat lebih menarik minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dan mengurangi volume kendaraan. Di Kota Bali masyarakat yang menggunakan angkutan umum sebesar 60% di bandingkan dengan yang menggunakan kendaraan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh subsidi BBM di Provinsi Bali sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam pertemuan juga dijelaskan bahwa strategi dan kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali agar subsidi BBM kepada konsumen pengguna transportasi lebih tepat sasaran adalah dengan berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM melalui koordinasi pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM solar subsidi dan premium dengan pihak Kepolisian sehingga meminimalisir terjadinya kelangkaan akibat ulah spekulan yang menimbun BBM bersubsidi.

Adapun kendala yang terjadi di lapangan terkait pendistribusian BBM bersubsidi adalah kebijakan harga subsidi BBM yang ditetapkan pemerintah masih kurang efektif. Masih terdapat pedagang bahan bakar minyak eceran yang enggan mengurus perizinannya dan tidak memiliki izin, kemudian berkurangnya nilai estetika/keindahan tata kota yang sudah ditetapkan oleh hadirnya rak/kios pedagang bahan bakar minyak eceran di sepanjang jalan protokol atau trotoar yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan atau pejalan kaki yang ada di trotoar.

Saran ke depan terkait subsidi energi dari Pemerintah Provinsi Bali adalah perlunya regulasi untuk mengatur pola distribusi BBM subsidi di SPBU agar tidak terjadi kelangkaan dan keresahan di masyarakat, dan pentingnya kerjasama dengan SPBU dalam hal penertiban bagi kendaraan-kendaraan yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan yang ada atau ketentuan di SPBU.

Terkait dengan subsidi secara umum, Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam pengawasan distribusi BBM adalah dengan berkoordinasi dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM solar subsidi dan premium dengan pihak Kepolisian.

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan bahwa subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat permasalahan dalam hal pengawasan. Di lapangan masih dapat ditemukan adanya penerima subsidi yang tidak tepat sasaran seperti subsidi BBM yang seharusnya untuk transportasi umum masih digunakan oleh kendaraan pribadi.

### **C. Jadwal Kegiatan**

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Kota Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan 18 November 2020.

## **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

### **1. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Bali**

1. Subsidi listrik di Provinsi Bali untuk konsumen sudah tepat sasaran. Khususnya di saat pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya subsidi listrik.
2. Pemberian subsidi BBM untuk mobil harus dilakukan perubahan kebijakan, misalnya ada pembatasan CC mobil yang berhak menerima subsidi. Karena banyak masyarakat yang tidak berhak

- menerima subsidi namun menikmati subsidi.
3. Subsidi BBM sektor transportasi untuk angkutan umum sudah tersalurkan penggunaannya.
  4. Subsidi BBM dan gas juga telah dirasakan dan diterima oleh nelayan dengan kondisi baik dan kualitas bagus sejak tahun 2012.
  5. Secara umum pemberian subsidi listrik, BBM dan gas sudah tepat sasaran dan tidak ada masalah *crusial*, meskipun masih terdapat beberapa desa yang tidak terjangkau listriknya tetapi sudah dapat menggunakan aki.
  6. Dari sisi pengawasan subsidi energi, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan perlunya meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Pemerintah Provinsi Bali sudah memiliki dinas ESDM yang secara khusus menangani pelaksanaan ketentuan tentang subsidi energi.
  7. Kebijakan subsidi energi masih diperlukan terutama pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana subsidi ini tepat sasaran dan diterima oleh rakyat yang berhak.
  8. Kebijakan subsidi energi masih diperlukan terutama pada masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana subsidi ini tepat sasaran dan diterima oleh rakyat yang berhak.

#### **Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara**

1. BAKN DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan BBM bersubsidi kepada sektor transportasi khususnya angkutan umum dan telah disalurkan penggunaannya.
2. Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan sosialisasi/edukasi kepada warga tentang pemberian subsidi energi berupa BBM, gas dan listrik dan meningkatkan kesadaran warga yang mampu agar tidak mengambil subsidi yang bukan haknya.
3. BAKN DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk meminta tambahan kuota LPG dan BBM bersubsidi, karena kebutuhan kuota yang naik sebagai dampak dari terjadinya covid-19.

#### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari konsumen/pengguna di Provinsi Bali terkait permasalahan alokasi pendistribusian subsidi energi. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari konsumen/pengguna atas kebijakan pemerintah pusat terkait subsidi energi.